



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/688/AA.05/2019
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2019

30 Desember 2019

Yth. **Wali Kota Sawahlunto**
di

Sawahlunto

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Sawahlunto. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto memperoleh nilai **60,06** atau predikat **B**. **Penilaian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Sawahlunto menunjukkan hasil yang baik.** Meski begitu, masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2018	2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,82	20,82
b.	Pengukuran Kinerja	25	14,78	14,31
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,62	9,66
d.	Evaluasi Internal	10	5,75	5,78
e.	Capaian Kinerja	20	9,26	9,49
	Nilai Hasil Evaluasi	100	60,22	60,06
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Uraian singkat hasil evaluasi terhadap implementasi akuntabilitas kinerja pada Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas hasil evaluasi AKIP tahun lalu belum ditindaklanjuti dengan optimal sehingga tidak terdapat perkembangan yang signifikan dalam implementasi akuntabilitas kinerja di Kota Sawahlunto dalam 1 tahun terakhir ini;
2. Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi AKIP di Pemerintah Kota Sawahlunto adalah:
 - a. Rumusan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja sebagian belum berorientasi hasil/*outcome* atau manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Berbagai indikator kinerja pada level Perangkat Daerah (PD) belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik atau 'SMART' (khususnya pada aspek spesifik, terukur dan relevan) sehingga keberhasilan pencapaian kinerja belum dapat dipastikan memberi manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat;
 - b. *Cascading* kinerja belum berjalan secara menyeluruh sampai pada level organisasi terendah. Pada beberapa PD belum komprehensif, terukur, relevan, dan berjenjang sesuai dengan levelnya dalam mendukung tercapainya sasaran strategis pada unit organisasi di atasnya, serta belum diselaraskan dengan proses bisnis sehingga efisiensi dan efektivitas program, kegiatan, dan anggaran belum optimal;
 - c. Belum terdapat upaya penyesuaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan indikator kinerja individu (IKI), dan capaian kinerja pegawai belum menjadi dasar penetapan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sehingga tingkat keberhasilan individu belum relevan dalam mendorong kinerja unit kerjanya;
 - d. Pemantauan dan evaluasi secara berkala atas capaian kinerja di level PD belum menyeluruh, berjenjang, dan belum ada analisis terhadap efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja sehingga belum efektif sebagai instrumen dalam pengambilan keputusan perubahan strategi apabila diprediksi target kinerja belum terpenuhi. Hal ini juga berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran;
 - e. Terdapat aplikasi e-SAKIP, e-*Planning*, dan penganggaran, namun belum terintegrasi dan belum sepenuhnya diimplementasikan sehingga belum efektif menjadi alat untuk memudahkan implementasi manajemen kinerja;
 - f. Kualitas analisis faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja pada Pelaporan Kinerja belum merata pada seluruh PD dan belum didukung dengan data yang andal. Di samping itu analisis efisiensi dan efektivitas program/kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis belum dilakukan sebab masih mengungkapkan aspek realisasi kegiatan dan

penyerapan anggaran sehingga belum efektif manfaatnya untuk peningkatan kinerja; dan

- g. Evaluasi kinerja oleh Inspektorat masih cenderung memberi nilai yang di atas kewajaran (*overstated*) dan rekomendasi perbaikan pada beberapa PD belum ditindaklanjuti sehingga belum efektif dalam mendorong peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada setiap PD.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Pemerintah Kota Sawahlunto, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melanjutkan penyempurnaan kualitas perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, seperti: orientasi pada hasil (*result oriented*), aspek kualitas indikator kinerja, dan keterpaduan atau integrasi perencanaan pembangunan daerah lintas PD (*integrated development plan*);
2. Menyempurnakan *cascade* kinerja yang komprehensif dan berjenjang sesuai dengan tingkatan unit kerjanya serta selaras dengan proses bisnis organisasi dan penganggarnya guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, kegiatan, anggaran, dan kinerja individu terhadap kinerja PD;
3. Memanfaatkan informasi kinerja, khususnya capaian kinerja organisasi dan individu sebagai dasar pemberian *reward and punishment* (penerapan TPP berbasis kinerja) melalui penyelarasan SKP dengan IKI. Hal ini dapat mendorong penguatan budaya kinerja individu dalam meningkatkan pencapaian kinerja organisasi;
4. Menyempurnakan kualitas rencana aksi pada seluruh PD yang selaras dengan perbaikan *cascade* kinerja sehingga rencana aksi tersebut dapat dimanfaatkan oleh PD sebagai instrumen dalam pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala guna memastikan bahwa anggaran dan sumber-sumber daya yang digunakan telah mencukupi untuk pencapaian sasaran strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah serta memiliki daya ungkit yang efektif dalam pencapaian kinerja;
5. Mengintegrasikan aplikasi *e-SAKIP*, *e-Planning*, dan penganggaran sehingga efektif menjadi alat untuk mendorong kualitas manajemen kinerja, khususnya penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*);
6. Meningkatkan kualitas informasi pelaporan kinerja oleh PD melalui pengungkapan analisis terhadap faktor-faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja, serta analisis efisiensi program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis. Informasi ini penting sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan strategis guna perbaikan kinerja untuk periode berikutnya sehingga dapat meningkatkan manfaat informasi pelaporan kinerja bagi *stakeholders* dalam mendorong perbaikan kinerja daerah; dan

7. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja PD oleh Inspektorat, khususnya pada aspek analisis temuan, penilaian, dan perumusan usulan rekomendasi perbaikannya. Selain itu, pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi perbaikan juga perlu ditingkatkan sehingga terdapat keyakinan yang memadai bahwa dapat PD menyelesaikan rekomendasi yang diberikan secara tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja sebagai penerapan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Kami menghargai upaya Wali Kota beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.



Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,

Muhammad Yusuf Ateh

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Barat.